

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
28 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



PJ GUBERNUR BERENCANA DIRIKAN LUMBUNG PANGAN KALTIM DI KUKAR DAN PPU

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





PJ GUBERNUR BERENCANA DIRIKAN LUMBUNG PANGAN KALTIM DI KUKAR DAN PPU

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Dr. Akmal Malik, memiliki rencana mendirikan lumbung pangan Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kedua wilayah ini dikenal sebagai sentra penghasil pertanian utama di Kalimantan Timur, terutama dalam produksi beras yang merupakan kebutuhan pangan pokok masyarakat.

Akmal bahkan telah mengadakan pertemuan langsung dengan para petani di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, guna berdiskusi mengenai permasalahan pertanian di daerah mereka.

“Di Kabupaten PPU, saya mendapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 9 ribu hektar lahan pertanian yang terbengkalai dan disebut sebagai lahan tidur. Bagi saya, tidak ada istilah lahan tidur, yang ada adalah orang yang tidur. Ketika orang tersebut bangun, maka lahan tersebut juga akan produktif,” tegas Akmal.

Setelah berdiskusi dengan camat, kepala desa, dan kelompok

tani setempat, Akmal menyimpulkan beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pertama, masalah irigasi sawah, keterbatasan infrastruktur dan peralatan pertanian (alsintan), biaya tinggi untuk pupuk, serta permasalahan pasca panen.

Ia pun meminta Dinas PUPR Kaltim untuk segera memperbaiki saluran irigasi utama yang ada agar lahan pertanian yang sudah ada dapat mendapatkan pasokan air, sehingga proses penanaman padi dapat dimulai bahkan selama musim kemarau. Akmal juga telah menjalin komunikasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman dan menyatakan bahwa pasukan TNI siap membantu persiapan PPU, terutama Babulu, sebagai sentra pangan di Kaltim.

“Kita tidak bisa mengharapkan semua permasalahan terselesaikan dalam satu kali upaya, tetapi kita akan mencoba secara bertahap,” ujar Akmal saat Kunjungan Kerja ke Kecamatan Babulu PPU pada Rabu (25/10/2023) lalu, seperti dilaporkan melalui laman resmi Pemprov Kaltim.

Sebelumnya, Akmal Malik juga

telah bertemu dengan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Dalam pertemuan tersebut, Edi menjelaskan rencana besar Kukar untuk menjadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

“Semangat kami, cita-cita kami adalah menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur,” kata Edi Damansyah di hadapan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Hotel Platinum Balikpapan, pada Senin (23/10/2023) malam.

Kukar sendiri telah menyiapkan lima kawasan pertanian terintegrasi yang berbasis kawasan. Kawasan-kawasan tersebut terletak di Kecamatan Marangkayu dengan luas 1.476 ha, Sebulu-Muara Kaman dengan luas 3.034 ha, Tenggarong-Loakulu dengan luas 4.106 ha, Tenggarong Seberang I dengan luas 4.447 ha, dan Tenggarong Seberang II dengan luas 4.447 ha.

Mimpi yang serupa ini akan diintegrasikan agar Kaltim dapat memiliki lumbung pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok di wilayah ini, terutama dalam rangka mendukung IKN di Kalimantan Timur. (KRV/pt/MK)



PERINGATI 33 TAHUN MENGABDI, AKABRI 1990 GELAR BAKTI SOSIAL UNTUK WARGA SAMARINDA

SAMARINDA - Dalam rangka memperingati Hari Pengabdian ke-33 Akabri 90, Kepolisian Resor Kota Samarinda (Polresta Samarinda) menggelar bakti sosial bagi masyarakat kota Samarinda. Kegiatan berupa penyerahan 700 paket sembako kepada masyarakat dan 300 paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Ary Fadli, S.I.K., M.H., M.Si mengatakan, acara Bakti Sosial Alumni Akabri 90 di Wilayah Polresta Samarinda ini merupakan salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh panitia dengan tujuan untuk memberikan bantuan sosial serta Pendidikan guna mendukung masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan.

"Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk membantu Pemerintah untuk

Stabilitas Perekonomian dan Program menuju Indonesia Maju," terang Kapolresta Samarinda di Gedung Buddhist Center, Rabu (25/10/23).

Tidak hanya Pembagian Sembako dan Pemberian perlengkapan sekolah, Akabri 90 juga merenovasi kediaman salah satu anggota Kepolisian Polresta Samarinda Aiptu I Dewa Ketut Sudiana yang beralamat di Jalan KS Tubun Gg. Jabal noor 2 No.60 Rt.10, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

"Sebagai wujud kepedulian, kami juga melakukan perbaikan atau bedah rumah kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Pinang Luar Polsek Samarinda Kota yaitu Bapak Aiptu I Dewa Ketut Sudiana," tutup Kapolresta Samarinda. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



POLSEK SUNGAI PINANG RINGKUS RESIDIVIS DENGAN 13 POKET SABU SIAP EDAR

SAMARINDA - Unit Opsnal Reskrim Polsek Sungai Pinang berhasil mengamankan seorang residivis berinisial SU dan barang bukti 13 paket sabu seberat 10,51 gram bruto, Kamis (26/10/2023)

Penangkapan terhadap SU adalah hasil pengembangan interogasi terhadap wanita berinisial IW yang telah diamankan sebelumnya. IW mengaku membeli barang haram tersebut dari SU dan akan dijual kembali dengan harga Rp 150 ribu per paket.

Berdasarkan keterangan dari IW, personel berhasil mengamankan SU di sebuah rumah singgah di Jalan Pinang Seribu, Kelurahan Sempaja Utara dan didapati barang bukti 1 paket sabu dalam saku celananya.

SU kemudian digiring ke rumahnya di Jalan Hasan Basri kemudian personel menemukan timbangan digital serta 8 paket sabu yang dimasukkan amplop dibawah lemari

hias, 1 plastik klip berisi 5 paket sabu yang disembunyikan dibawah lemari pakaian dan uang tunai Rp 1.050.000 hasil penjualan narkoba.

Kapolsek Sungai Pinang Kopol Ahmad Abdullah, S.H., M.H. menjelaskan bahwa tersangka SU sebelumnya juga sudah pernah di bui dengan kasus yang sama dan saat ini dijerat kembali dengan pasal 114 sub Pasal 112 sub pasal Sub 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

"Kami dari Jajaran Polsek Sungai Pinang terus berusaha untuk memberantas perdagangan Narkotika dan ini juga membutuhkan peran aktif masyarakat terutama untuk menjaga keluarganya agar tidak terjerumus dalam lingkaran narkotika," Kapolsek Sungai Pinang. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



MILIKI 3 POKET SABU, SEORANG PRIA DIAMANKAN POLRESTA SAMARINDA

SAMARINDA - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Yakni, dengan menangkap satu orang pelaku di sebuah rumah di Jalan P. Hidayatullah Gg.Amal Blok C Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Kronologis penangkapan bermula pada pada hari Senin (23/10/2023), diterima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan P. Hidayatullah Gg.Amal Blok C Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

Kemudian, anggota Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat, dan sekitar pukul 17.55 Wita dilakukan penggeledahan pada salah satu rumah pada alamat tersebut dan ditemukan 1 orang laki-laki berinisial HH (29) yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumah di lantai 2. Di

tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1,93 gram bruto beserta barang bukti lainnya yang berada pada lantai kamar tepatnya di depan pelaku.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas di antaranya, 3 poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,93 gram bruto, 1 bendel klip plastik, 1 buah sendok penakar, 1 unit timbangan digital warna hitam merk digital scale, 1 unit Handphone Android merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp 450 ribu yang diduga sebagai hasil dari keuntungan penjualan narkotika jenis sabu-sabu.

Pelaku HH (29) beserta barang buktinya diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsidiar pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati

SOAL BUAYA RISKA, WAKIL KETUA KOMISI IV SARANKAN DIRAWAT LEMBAGA KONSERVASI

SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mendukung rencana Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk membuat penangkaran khusus bagi buaya Riska yang berorientasi pada konservasi.

"Buaya Riska adalah aset yang sangat berharga untuk melestarikan spesies yang terancam punah," ujar Puji di Samarinda awal pekan lalu.

Dia mengusulkan agar buaya Riska dikelola oleh lembaga konservasi atau organisasi yang peduli dengan perlindungan hewan.

"Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar serta keberlangsungan hidup hewan tersebut," katanya.

Puji juga menekankan agar pengelolaannya nanti mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya manajemen limbah yang timbul selama pengelolaan.

"Lokasi penangkaran buaya tersebut dekat dengan permukiman warga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk potensi pencemaran udara. Oleh karena itu, perlu ada tindakan bijak dan berkelanjutan dalam merencanakan pengelolaan hewan tersebut," ungkapnya.

Dia berharap dukungan dari berbagai pihak akan mendorong pengembangan

wisata yang mengintegrasikan aspek konservasi hewan dan pengalaman wisata yang berkualitas.

"Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berjanji untuk mencari solusi terbaik untuk kelangsungan hidup buaya Riska setelah dievakuasi dari habitat asalnya di Sungai Guntung Bontang ke tempat baru di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan.

"Buaya Riska ini menarik perhatian banyak orang. Namun, Buaya Riska ini adalah binatang buas. Sebagai binatang buas, dia berhak untuk hidup di habitatnya," ucap Pj Gubernur Akmal Malik saat didampingi Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan Timur, Selasa.

Menurut Akmal, kondisi tempat penampungan Buaya Riska sangat tidak memadai. Kondisi ini ditakutkan membuat Buaya Riska semakin stres.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang BKSDA untuk mencari jalan terbaik untuk Riska dan keselamatan masyarakat. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi

PERINGATAN HARI Sumpah Pemuda, KETUA KOMISI IV AJAK GENERASI MUDA TERUS TINGKATKAN KEMAMPUAN

SAMARINDA - Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengimbau para pemuda di Bumi Etam untuk siap menghadapi tantangan masa depan. Apalagi setelah Kaltim ditunjuk menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Reza menerangkan sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya para pemuda tak apatis dengan aspek dan isu yang berkembang di negara ini. Serta terus meningkatkan kemampuaan semangatnya, serta memiliki karakter yang kuat agar memiliki daya saing.

"Kalian adalah pemuda masa depan. Kaltim kini sudah menjadi ibu kota negara, artinya kalian punya peran besar dalam sejarah. Ayo, pemuda Kaltim, tunjukkan kehadiran kalian untuk semua," ujar Reza pada Jumat (27/10/2023).

Politisi Gerindra ini, menyebut bahwa pemuda kini harus bisa menanggapi tantangan dunia yaitu menyiapkan generasi yang memiliki skill atau keahlian yang sesuai dengan tuntutan zaman.

"Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kualiti-

tas pendidikan adalah dengan meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Bahasa adalah jendela dunia. Dengan menguasai bahasa asing, pemuda dapat memperluas wawasan dan jaringan mereka," katanya.

Reza juga mengingatkan pemuda kini harus memiliki wawasan kebangsaan dan semangat mengisi kemerdekaan. Dia berharap pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan dan meneruskan perjuangan para pahlawan.

"Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda harus menjadi pelopor dan penggerak dalam segala bidang, serta harus menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945," ungkapnya.

Reza berpesan agar pemuda tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Ia mengajak pemuda untuk selalu berpikir positif dan kreatif dalam mengembangkan potensi diri dan daerah.

"Saya yakin pemuda Kaltim memiliki semangat juang yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan

bangsa dan negara," imbuhnya.

Selain itu, katanya peran pemuda dalam menghadapi pemilu sangat penting untuk menentukan masa depan Indonesia.

Ia menjelaskan, dalam kepemilihan, pemuda dapat berkontribusi dalam berbagai cara, seperti meningkatkan partisipasi dalam pemilu dengan melakukan registrasi pemilih dan menggunakan hak suaranya. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik.

Dirinya juga meminta, para pemuda mengawasi jalannya pemilu dengan menjadi penyelenggara, pengamat, atau relawan. Lalu mengembangkan kreativitas dalam kampanye politik dengan menggunakan media sosial, seni, atau budaya. Dan tak luput, ucapnya, yakni menghindari politik uang dan politik identitas yang dapat merusak demokrasi dan keadilan," tutup Reza.

"Pemuda adalah agen perubahan, partisipan aktif, pemilih yang kritis, dan pengawas yang jujur," ucapnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji

SENO AJI DORONG PEMPROV KALTIM PERCEPATAN LELANG DAN PENGADAAN PROYEK TAHUN 2024

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengingatkan Pemerintah agar segera mematangkan perencanaan program pembangunan untuk tahun depan. Dia mengharapkan, semua proyek yang direncanakan bisa dieksekusi dengan lancar dan tepat waktu.

Menurut Seno, salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah proses lelang dan pengadaan. Dia menilai, proses ini sering kali berjalan lambat dan menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek.

"Proses lelang dan pengadaan harus dilakukan sejak awal tahun. Jangan sampai mepet di akhir tahun. Ini akan mengganggu kinerja pihak ketiga yang mengerjakan proyek," kata Seno.

Seno menjelaskan, banyak proyek berskala besar yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Jika proses lelang dan pengadaan tidak efisien, maka pemenang lelang akan kesulitan untuk menyelesaikan

proyek sesuai target.

"Ini akan berdampak pada kualitas pembangunan dan serapan anggaran. Banyak anggaran yang tidak terserap karena proyek tidak selesai. Ini disebut Silpa. Kalau Silpa terus terjadi, pembangunan tidak akan maksimal," ujar Seno.

Untuk mengatasi masalah ini, Seno meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses lelang dan pengadaan. Dia juga berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat pembangunan.

Seno mengaku optimis bahwa pembangunan di Kaltim akan lebih baik di tahun depan. Dia mengatakan, DPRD Kaltim sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengawasi dan mendukung program-program Pemprov Kaltim.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji

SENO AJI MINTA PEMERINTAH LIBATKAN KONTRAKTOR LOKAL PADA PEMBANGUNAN IKN

SAMARINDA - Geliat pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung. Dalam proses pembangunan di Nusantara diharapkan tak luput untuk melibatkan penyedia jasa konstruksi daerah Kaltim.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, saat menghadiri seminar nasional bertajuk 'Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur' di Grand Senyuir Hotel Balikpapan, Kamis (26/10/2023).

Menurutnya Pemerintah Pusat, Badan Otorita dan juga Pemprov Kaltim semestinya tak abaikan kontraktor lokal dalam proses pembangunan Nusantara di Kaltim. Karena sejatinya kehadiran IKN, semestinya memberikan dampak positif pada masyarakat

Kaltim.

"Maka sangat baik apabila badan Otorita bersama dengan pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal," ucap Politisi Gerindra ini.

Seno lebih lanjut mengatakan, sebaiknya para pelaku jasa konstruksi melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan perusahaan skala nasional, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Inilah yang kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para pelaku jasa konstruksi, para pemilik perusahaan jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam pembangunan Kaltim," tutup Seno.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Andi Faisal Assegaf saat Gelar Reses di Desa Bente Tualan

ANDI FAISAL SERAP ASPIRASI MASYARAKAT DESA BENTE TUALAN

PASER - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi I, Andi Faisal Assegaf mengadakan reses di Desa Bente Tualan, Kecamatan Longkali, pada Senin (23/10/2023) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari reses massa persidangan III Tahun 2023 yang bertujuan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Andi Faisal Assegaf menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban anggota DPRD yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Reses berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan geografis mereka. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan diteruskan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, Andi Faisal Assegaf juga mengharapkan agar masyarakat dapat menyam-

paikan usulan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

"Kami akan selalu berjuang untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan meminta pemerintah untuk memprioritaskannya. Kami selalu siap untuk melayani aspirasi warga," ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam reses. Ia berjanji akan terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam reses tersebut Hj. Noverie Amelia Parmiesca, Anggota DPRD Kabupaten Paser, Kaur Pembangunan Desa Bente Tualan, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. (Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin

KOMISI I DPRD KALTIM MINTA BAWASLU PERHATIKAN NETRALITAS KADES SELAMA PEMILU 2024

SAMARINDA - Menjelang Pemilu 2024, netralitas aparatur desa menjadi perhatian penting. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin meminta Bawaslu untuk mengawasi sikap dan perilaku kades dan aparatur desa lainnya.

Ia mengatakan, kades tidak boleh berpihak kepada calon manapun atau mempengaruhi pilihan warga.

"Khususnya bagi ketua-ketua RT di wilayah mereka. Aparatur negara kan harus netral, begitu juga dengan aparatur desa," ungkap Jahidin.

Karena Kades dinilai punya pengaruh besar terhadap ketua-ketua RT di wilayahnya, ia mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas.

Ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu untuk menjamin proses Pemilu yang jujur dan adil.

"Jika ada pelanggaran yang terbukti, Bawaslu harus melanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut," ujar Jahidin.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga berharap, Bawaslu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kades-kades di Kaltim. Ia mengingatkan, Pemilu sudah semakin mendekat.

Disebutkan, kades dilarang ikut campur dalam kampanye Pemilu 2024. Kades juga harus bersikap adil dan tidak memberi keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewartanya : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim Rusman Yaqub (Tengah)

DPRD BERI APRESIASI PWNU JADI GARDA TERDEPAN AJAK MASYARAKAT MEMBELA NEGARA

SAMARINDA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim menggelar acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W 1445 Hijriah sekaligus peringatan hari Santri Nasional di Kantor PWNU Kaltim Samarinda, Kamis (26/10/2023).

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi IV Rusman Ya'qub yang mewakili Ketua DPRD Kaltim, Kepala Kesbangpol Sufian Agus yang mewakili Pj Gubernur Kaltim, Ketua MUI Kaltim H.Muhammad Rasyid, dan Ketua PWNU Kaltim Fauzi Bahtar.

Tujuannya gelaran ini, yakni mengajarkan cinta kasih sayang, toleransi, dan kedamaian bagi umat Islam. Acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali ukhuwah islamiyah dan silaturahmi antar umat. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang untuk memberikan bantuan paket sembako kepada 500 anak yatim dan kaum dhuafa yang membutuhkan.

Rusman Ya'qub dalam sambutannya mengatakan bahwa umat Islam harus bersatu-padu dalam mempertahankan negara dari ancaman luar maupun dalam. Ia mengapresiasi peran PWNU Kaltim yang selalu tampil terdepan dalam mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan membela negara.

"Ancaman dari negara luar boleh dikatakan relatif tidak ada masalah tetap bagi kita warga Indonesia keharusan kewajiban untuk membela negara. Organisasi ini selalu

lu tampil terdepan untuk bagaimana mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan untuk selalu membela negara maka itu adalah wajib bagi seluruh warga negara untuk mempertahankan negaranya", ujar Rusman Ya'qub.

Sementara itu, Sufian Agus yang mewakili Pj Gubernur Kaltim mengatakan bahwa ini adalah momen yang sangat spesial untuk merenungkan tentang ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ia juga berharap bahwa warga NU Kaltim dapat dewasa dalam menyikapi pesta demokrasi yang akan datang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba.

"Insyallah warga Nahdlatul sudah sangat dewasa dalam menyikapi pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 tahunan yang insyaallah warga Nahdlatul Ulama akan dewasa dalam menyikapi semua aliran-aliran politik yang berkembang dalam menghadapi pesta pemilu saya kira warga Nahdlatul pasti tidak akan terprovokasi dengan pihak", harap Sufian Agus.

Acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W dan peringatan hari Santri Nasional ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, shalawat badar, ceramah agama, serta penyerahan simbolis bantuan paket sembako kepada kaum yatim piatu dan dhuafa. (adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL



TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ **30% OFF**

Rp488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Mini Mantou
5 pcs



BOOK NOW

0811 581 3669

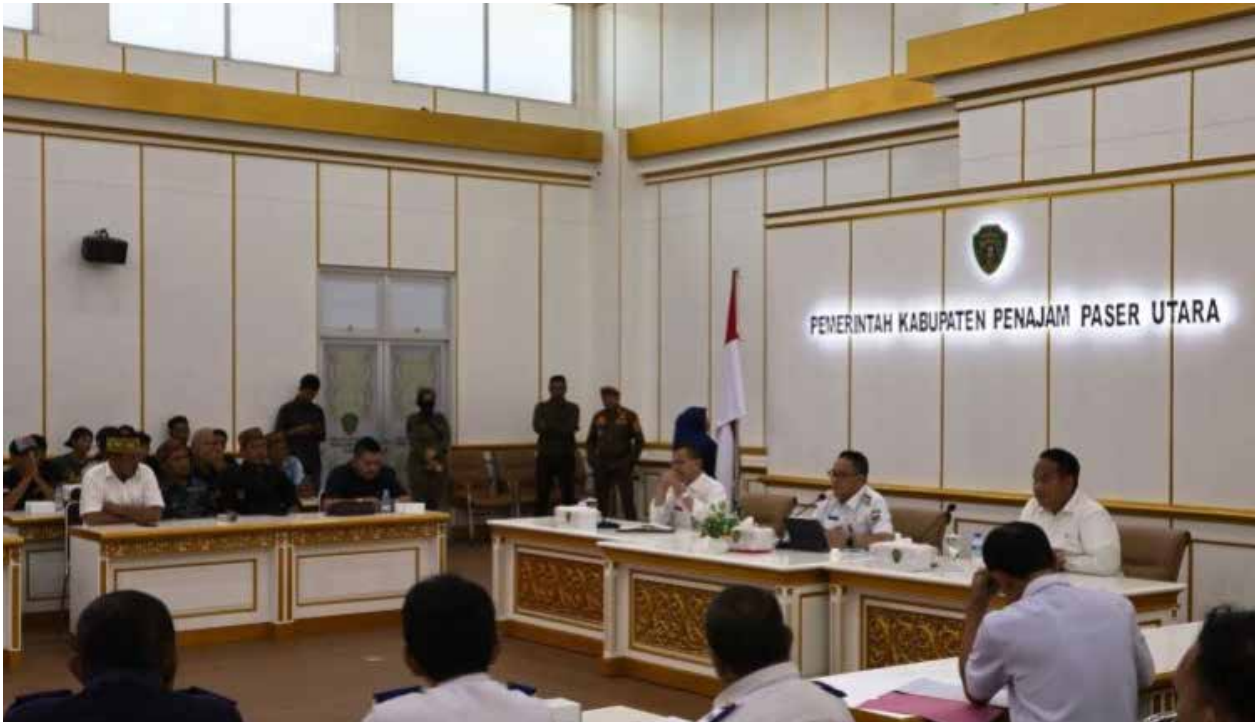
www.hotelgrandkartika.com



PEMKAB PPU AWASI KETAT DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI



DINAS KESEHATAN PPU
LAKUKAN AKSI GIZI DI SEKOLAH
CEGAH STUNTING



Para sopir truk Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdialog dengan pemerintah kabupaten setempat menyangkut BBM jenis solar subsidi, Rabu (25/10/2023)

PEMKAB PPU AWASI KETAT DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melakukan pengawasan ketat terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), terutama solar bersubsidi.

“Sopir truk seringkali datang dan mengadu kepada kami karena mereka kesulitan mendapatkan BBM solar subsidi,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Rabu.

Pemerintah kabupaten menindaklanjuti keluhan sopir truk itu dengan mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Anggota Satpol PP diminta mengawasi pendistribusian solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selama 24 jam.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Penajam dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0913 setempat untuk mengawasi ketat distribusi solar.

Salah seorang perwakilan sopir truk di Penajam, Ibrahim, mengaku seringkali harus mengantre hingga berhari-hari untuk mendapatkan 100-200 liter solar subsidi di SPBU. “Kami minta pemerintah kabupaten

agar mengatasi sulitnya dapat solar subsidi di SPBU,” kata perwakilan sopir truk Ibrahim.

SPBU yang dimaksud Ibrahim antara lain SPBU di Jalan Provinsi Kilometer 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kuota solar subsidi itu sebenarnya cukup untuk kebutuhan truk, tapi kami tidak tahu kenapa selalu kurang,” katanya.

Truk yang antre untuk mengisi solar bersubsidi di SPBU itu diperkirakan mencapai sekira 200 truk. Ibrahim mengatakan jatah 100-200 liter solar bersubsidi itu untuk digunakan dua sampai tiga hari.

Menurut penuturan Ibrahim, SPBU di Jalan Provinsi Kilometer 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, mendapatkan jatah solar bersubsidi dari PT Pertamina (Persero) antara 9-16 ton per hari.

Para sopir truk memperkirakan jatah solar bersubsidi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi, para sopir truk tetap saja harus mengantre dari malam sampai pagi hari, bahkan seringkali tidak mendapatkan solar subsidi dengan alasan habis, demikian Ibrahim. (ant/MK)



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Jansje Grace Makisurat

DINAS KESEHATAN PPU LAKUKAN AKSI GIZI DI SEKOLAH CEGAH STUNTING

PPU - Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, melakukan aksi gizi di sekolah sebagai upaya pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurang asupan gizi di daerah berjuduk Benuo Taka itu.

"Penanganan gangguan pertumbuhan anak merupakan prioritas nasional sehingga pencegahan stunting harus dilakukan dengan program yang tepat," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Jansje Grace Makisurat di Penajam, Jumat.

Program pencegahan kekerdilan atau gangguan pertumbuhan anak yang dijalankan di antaranya, lanjut dia, aksi bergizi dengan menerjunkan petugas ke sekolah di daerah itu setiap satu pekan sekali.

Program aksi bergizi di sekolah itu merangkai kegiatan olahraga, sarapan bersama, dan pemberian tablet penambah darah untuk remaja putri.

Pemberian tablet penambah darah kepada remaja putri di setiap sekolah itu sebagai upaya pencegahan gangguan pertumbuhan anak sejak dini.

Dinas Kesehatan menjalankan program pencegahan kekerdilan anak lainnya dengan menyasar calon pengantin di daerah berjuduk

Benuo Taka itu.

Edukasi menyangkut pentingnya asupan gizi yang cukup agar kondisi kandungan tetap sehat, sehingga bayi dapat lahir dan tumbuh normal sangat penting diberikan kepada calon pengantin.

"Kami berikan edukasi mengenai cara pencegahan anak lahir stunting kepada calon pengantin," ujarnya.

Penanganan gangguan pertumbuhan anak juga dilakukan dengan pemberian bantuan tambahan gizi kepada anak yang tercatat mengalami gangguan pertumbuhan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saat ini balita yang terdata mengalami kekerdilan di Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 1.034 orang, di Kecamatan Penajam 345 anak, Kecamatan Waru 24 orang, Kecamatan Babulu 311 balita dan di Kecamatan Sepaku 354 orang, dan masih terus dilakukan pendataan.

Penanganan stunting bukan mengobati dan memberikan bantuan tambahan gizi saja, tetapi pencegahan sejak dini melalui penyuluhan atau sosialisasi juga sangat penting, demikian Jansje Grace Makisurat.

Oleh : Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Nurul Hayat



SIAP-SIAP, KUKAR BERSHOLAWAT JILID II BERSAMA HABIB SYECH BAKAL DILAKSANAKAN SABTU BESOK



**KEHADIRAN RPB BAWA
SEMANGAT BARU BAGI PETANI JAHE
DI JONGGON JAYA**



Flyer Kukar Bersholawat Jilid II yang akan dipandu Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. (Istimewa)

SIAP-SIAP, KUKAR BERSHOLAWAT JILID II BERSAMA HABIB SYECH BAKAL DILAKSANAKAN SABTU BESOK

TENGGARONG – Gelaran Kutai Kartanegara (Kukar) Bersholawat jilid II, siap dilaksanakan di Taman Kota Raja Tenggarong, pada Sabtu (28/10/2023) besok. Gelaran kali kedua Kukar Bersholawat di tahun 2023 ini, akan dipandu langsung oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf dari Surakarta, Jawa Tengah.

H-1 jelang pelaksanaannya, Pemkab Kukar bersama Yayasan Al Khair Wal Barokah terus mematangkan persiapan. Diprediksi, kegiatan ini bakal dihadiri oleh ratusan ribu jamaah.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pun memastikan saat ini semua persiapan berjalan lancar karena telah dilakukan rapat finalisasi. Ia juga menyebut persiapan terus dipenuhi untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah.

“Kita berharap tidak ada kendala yang be-

rarti. Mohon doanya agar semuanya lancar, agar masyarakat yang hadir juga bisa nyaman untuk ikut bersholawat,” ujar Rendi.

Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan.

Termasuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Banser hingga Pemuda Pancasila. Untuk membahas keperluan pengalihan arus lalu lintas hingga keamanan.

“Agar lalu lintas jalan tepat berjalan lancar, nantinya akan ada penutupan jalan mulai dari depan Kantor KPU, Aji Masnadai, hingga jalan depan Kantor DPRD Kukar. Untuk menampung kendaraan tamu VIP maupun jamaah,” kata Dendy. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Gambaran RPB jahe yang dibangun di Desa Jonggon Jaya. (Ady/Radar Kukar)

Kehadiran RPB Bawa Semangat Baru Bagi Petani Jahe di Jonggon Jaya

TENGGARONG - Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Jahe di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, kabarnya hampir rampung dikerjakan. Kepala Desa (Kades) Jonggon Jaya, Muhammad Kholil, mengatakan pabrik produksi tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mulai beroperasi.

Kabar ini pun membawa angin segar bagi para petani jahe di Desa Jonggon Jaya. Setelah benerapa waktu kebelakang, semangat para petani jahe sempat melemah. Karena jatuhnya harga jahe dan virus yang belum bisa ditemukan solusinya.

"Ini sebagian petani sudah mulai semangat lagi untuk menanam," kata Kholil, Jumat (27/10/2023).

Ia menuturkan, beberapa petani sudah mulai membuka lahan untuk menanam jahe. Beriringan dengan curah hujan yang sudah mulai turun setelah beberapa bulan kebelakang setelah memasuki musim ke-

marau.

Kholil juga menambahkan, semangat para petani untuk kembali menanam jahe ini juga dirangsang dengan penyaluran bantuan berupa bibit jahe. Yang disalurkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar).

"Alhamdulillah, kemaren juga ada bantuan bibit jahe 10 ton dari Distanak Kukar," ujarnya.

Dengan adanya RPB jahe ini, Kholil berharap dapat meningkatkan perekonomian para petani jahe di desanya. Apalagi memang Desa Jonggon Jaya dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil jahe yang cukup besar di Kukar.

"Mudah-Mudahan dengan adanya RPB ini harga jahe bisa stabil, jadi petaninya juga bisa sejahtera dan semangat menanam. Karena kan nanam jahe ini juga cukup sulit perawatannya," tutup Kholil. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Loa Kulu, Adriansyah. (Ady/Radar Kukar)

Kecamatan Loa Kulu Bakal Bangun TPA di Desa Jembayan Dalam

TENGGARONG - Sampah terus menjadi permasalahan yang timbul beriringan dengan pertumbuhan populasi penduduk. Untuk mengatasi masalah kebersihan lingkungan ini, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu berencana membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Jembayan Tengah.

Langkah ini dianggap strategis untuk diambil, mengingat masalah kebersihan lingkungan kerap tak terkendali. Tak jarang, warga setempat menghadirkan solusi alternatif dengan melakukan pembakaran sampah. Padahal, hal ini dinilai tidak menyelesaikan persoalan. Justru hanya menambah polusi bagi lingkungan sekitar.

Untuk segera merealisasikan pembangunan TPA tersebut, Camat Loa Kulu, Adriansyah, mengaku pihaknya tengah menyiapkan lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi TPA. Direncanakan, lokasi TPA ini akan

dibuat jauh dari pemukiman warga.

"Di Jembayan Tengah itu ada lahannya pemerintah untuk kita jadikan tempat pembuangan akhir sampah," kata Adriansyah.

Untuk diketahui, sejatinya Kecamatan Loa Kulu telah memiliki TPA yang berada di Desa Loa Kulu Kota. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertumbuhnya jumlah penduduk, TPA tersebut dinilai sudah tidak representatif untuk tetap difungsikan.

Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Adriansyah juga mengaku telah mendapat bantuan tambahan armada, untuk mengangkut sampah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

"Jadi sementara ini kita buang sampah dari Loa Kulu ini ke TPA di Tenggarong," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadi Raharjo (Ady/Radar Kukar)

Dispar Kukar Salurkan Bantuan Saprass Penunjang Wisata Bagi Pokdarwis

TENGGARONG - Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar), terus berikan dukungan penuh untuk pengembangan potensi wisata di tiap desa. Bahkan siap berikan bantuan berupa sarana dan prasarana (saprass) pengembangan wisata.

Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo, mengatakan pihaknya siap untuk memfasilitasi usulan bantuan sarana penunjang objek wisata yang sedang dikembangkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

"Untuk bisa menerima bantuan tersebut tentu ada persyaratan yang perlu dipenuhi. Yaitu mengajukan permohonan ke Dispar, setelah itu dilakukan verifikasi, apakah permohonan sudah memenuhi syarat," kata Slamet.

Verifikasi yang dimaksud, yakni meliputi keaktifan pokdarwis di lapangan dalam pengembangan potensi wisatanya. Keaktifan

membuat laporan bulanan, serta penilaian lainnya. Sejauh ini, kata Slamet, Dispar Kukar telah menyalurkan beberapa bantuan saprass penunjang destinasi wisata seperti penginapan. Bantuan tersebut disalurkan pada Pokdarwis Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu dan Pokdarwis Kersik Kecamatan Marang Kayu.

"Ada beberapa objek wisata yang potensi menginap di lokasi, dan ini perlu dukungan dari pemerintah," serunya.

Bantuan saprass yang disalurkan oleh Dispar Kukar ini, diharapkan mampu memberikan dorongan pengembangan sektor wisata di desa. Sehingga destinasi wisata yang dikembangkan tersebut mampu memberikan dorongan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Serta memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes). (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



KOTA BONTANG RAIH PENGHARGAAN PROKLIM 2023

BACA HALAMAN A2

a



DAFTAR PEMENANG BCC DAN PAWAI BUDAYA 2023



Wali Kota Bontang, Basri Rase (kanan) saat menerima penghargaan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya. (ist)

Kota Bontang Raih Penghargaan Proklim 2023

BONTANG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyerahkan 602 penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2023. Penganugerahan tersebut diserahkan kepada beberapa daerah di Indonesia.

Bontang patut kembali berbangga. Pasalnya Bontang kembali diganjar penghargaan Proklim 2023 yang diterima langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, Selasa (24/10/2023), di Auditorium DR. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, bahwa penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi, kepada daerah yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan Proklim.

"Penghargaan yang diberikan kepada bapak ibu yang hadir dalam kesempatan ini, merupakan pengakuan atas kerja keras bapak ibu saudara baik dari pelaksanaan Proklim, kepala daerah yang telah menjalankan fungsi pembinaan dengan baik, serta dunia usaha ataupun lembaga swadaya masyarakat

yang mengambil peran aktif dalam mendukung dan mendampingi pelaksanaan Proklim," ucapnya.

Senada dengan itu, Basri Rase mengungkapkan terima kasih dan apresiasinya atas sinergi semua pihak dalam menyukseskan Proklim di Kota Taman.

"Penghargaan ini bukan hanya seremonial saja tapi menjadi komitmen bersama tentang kepedulian kita terhadap lingkungan, dan juga sebagai semangat dan motivasi kita untuk dipertahankan dan kita tingkatkan. Penghargaan dari pemerintah pusat ini merupakan kepedulian kita tentang efek gas rumah kaca dan pemanasan global," ungkapnya

"Saya berharap, ke depannya melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggungjawab terkait lingkungan hidup, bagaimana untuk terus menambah kawasan-kawasan Proklim seperti Kelurahan Telihan. Saya ucapkan terima kasih atas capaian penghargaan, dan berharap Bontang benar-benar menjadi kota Green City," harapnya.

Editor: Yusva Alam



Para pemenang turnamen saat menerima hadiah. (ist)

Peringati HKN ke-59, Dinkes Adakan Turnamen Badminton Antar Rumah Sakit

BONTANG—Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang mengadakan turnamen badminton antar rumah sakit se-Bontang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sejak Jumat (20/10/2023) lalu di Gedung Badminton Amarik.

Muhammad Mahfuds, Koordinator Turnamen Badminton HKN ke-59 menjelaskan, bahwa HKN diperingati setiap tanggal 12 November tiap tahunnya. Karenanya pihaknya mengadakan turnamen ini untuk ikut merayakan HKN tersebut.

"Selain itu dengan turnamen ini kami ingin mempererat silaturahmi antara fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Bontang," ujarnya.

Dibeberkannya, kegiatan ini diikuti se-

banyak 5 rumah sakit ditambah perwakilan Dinkes Bontang. Turnamen ini mempertandingkan nomor beregu dan di dalam nomor beregu tersebut terdapat nomor ganda putra, ganda putri, dan campuran.

"Ya semacam Thomas dan Uber Cup lah. Masing-masing rumah sakit mengirimkan 2 tim perwakilan. Sementara Dinkes mengirimkan 4 tim perwakilan," ungkapnya.

Dari hasil turnamen tersebut keluar sebagai juara 1 adalah RS Amalia A. Lalu juara 2 diraih RSUD Taman Husada A. Kemudian untuk juara 3 terdapat juara 3 bersama, yaitu RS PKT A dan RSIB A.

"Masih banyak agenda kegiatan kami ke depannya, dalam rangka memperingati HKN ke-59 ini," pungkas Mahfud. (al/adv)



Penampilan salahsatu peserta BCC 2023 Kota Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

Daftar Pemenang BCC dan Pawai Budaya 2023

BONTANG – Pasca pelaksanaan Bontang City Carnival (BCC) 2023 pada tanggal 21 Oktober lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang mengumumkan para pemenang event tahunan tersebut.

Kadisdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan, bahwa penilaian ini tidak ada campur tangan dari pihaknya, karena ia menyerahkan seluruhnya ke dewan juri.

"Ini murni juri yang nilai, dari disdikbud nggak ikut nilai," tegasnya.

Surat keputusan berdasarkan Kepala Disdikbud Bontang nomor 400.6.3/242/SK/DISDIKBUD tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penerapan pemenang BCC dan 10 favorit pawai budaya tingkat Kota Bontang.

Juara pertama BCC 2023 ditujukan pada PT. Badak LNG dengan skor 242, juara kedua Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan skor 228, Juara ketiga Kerukunan Keluarga Banyuwangi (KKB) kolaborasi

dengan Kelurahan Satimpo dengan skor 222.

Kemudian untuk juara harapan I yakni House Of Make Up Bontang dengan skor 215, juara harapan kedua yakni Dinas Lingkungan Hidup dengan skor 210 dan Juara Harapan III SMPN 1 Bontang dengan skor 205.

Dilanjutkan dengan 10 favorit pawai budaya yakni kesenian kuda lumping Ryo Manggolo Putro, SMPN 5, Sekretariat Daerah bersama pemuda banjar Kota Bontang, Satu Wiwit Ika Wangi berkolaborasi dengan Kelurahan Satimpo, Paguyuban IKBNTT, Lembaga Adat Kutai Kota Bontang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Keluarga Besar Adonara (Flores Timur), dan Kecamatan Bontang Barat.

"Setelah ini saya harap para peserta tetap semangat untuk terus meramaikan kegiatan tahunan ini akan semakin meriah," harap Bambang.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



Ilustrasi anak terlambat berbicara. (ist)

Kenali Ciri, Penyebab, dan Cara Mengatasi Anak Terlambat Bicara

BONTANG - Kemampuan bicara anak merupakan salah satu yang paling dinanti-nanti oleh setiap orang tua. Memasuki usia 2 tahun, kemampuan bicara anak sudah bisa dikatakan cukup lancar, meski yang diucapkan belum jelas dan beraturan. Namun, jika anak kesulitan berbicara atau sama sekali tidak bisa mengucapkan kata apa pun pada usia 2-3 tahun, ini dapat menandakan keterlambatan bicara.

Dokter Spesialis Anak di RSUD Taman Husada, dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, menjelaskan, ada banyak sekali penyebabnya anak terlambat bicara. Seperti gangguan pendengaran, sehingga anak belum bisa berbicara. Bahkan ada juga anak yang kurang simulasi, tidak diajarkan untuk berbicara, maka si anak belum bisa bicara.

"Ada banyak sekali kendalanya jika anak terlambat buat bicara, seperti gangguan pendengaran, di lingkungannya kurang diajak komunikasi, dan bahkan si anak sering diberi gadget," ucapnya, Selasa (24/10/2023) kemarin.

Pada usia 0-6 bulan, anak sudah dapat berbicara, dari kata yang belum ada maknanya atau belum jelas. Intinya mampu bersuara dan mengeluarkan bunyi seperti tertawa.

Pada usia 8-9 bulan, berubah menjadi Babbling. Dapat mengucapkan kata mama atau papa, walaupun belum jelas. Jika anak belum bisa mengucapkan, itu bertanda anak sudah terlambat bicara.

Pada usia 16 bulan, minimal harus sudah bisa memanggil orang tuanya, seperti mama, ayah, atau yah. Di usia 18 bulan, anak harus menambah kosa katanya, seperti "mamam" untuk makan, "duh" untuk sesuatu yang membuatnya sakit, bahkan "ndak" untuk tidak mau.

Bahkan, di usianya yang beranjak 2 tahun, anak sudah bisa merangkai dua kata menjadi satu kalimat seperti "mah mam," artinya mamah makan, atau "ndak mau" artinya tidak mau. Jadi anak umur berapa pun sudah ada target cara bicara.

Cara mengatasi keterlambatan bicara pada anak adalah, melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan kemungkinan penyebab anak jadi terlambat bicara. Mulai dari masalah pendengaran, hingga gangguan perkembangan.

"Jadi, bagi para orang tua jangan langsung sakit hati, atau tersinggung dengan adanya teguran, atau jika ada orang yang menegur terkait anak, menilai jika anak kita terlambat bicara lebih baik didengarkan masukannya dan konsul ke ahlinya," paparnya.

Nantinya, dokter mungkin akan menyarankan anak untuk menjalankan terapi sebagai cara mengatasi anak terlambat bicara. Peran orang tua sangat besar untuk bantu mengembangkan keterampilan bicara anak sejak usia sangat dini. Sebab, bertambahnya kosakata anak akan berbanding dengan jumlah kata yang anak dengar. (dwi/adv)



Ilustrasi buku kesehatan Ibu dan anak. (ist)

Pentingnya Penggunaan Buku KIA

BONTANG - Buku Kesehatan Ibu dan Anak, atau yang sering disebut dengan Buku KIA (buku pink) merupakan integrasi dari beberapa catatan kesehatan seperti kehamilan, persalinan, nifas, Kartu Menuju Sehat (KMS), untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan kartu imunisasi.

Dokter Spesialis Anak di RSUD Taman Husada, dr Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, mengatakan untuk saat ini buku KIA sudah dengan versi yang terbaru, atau dengan versi 2023. Dalam buku KIA tersebut ada cara menilai perkembangan anak, mulai dari usia 0-72 bulan, atau 6 tahun.

"Sekarang ada versi terbarunya buku pink, versi 2023. Semuanya ada di dalam buku itu, semua langkah-langkah dan cara tumbuh kembang anak," ucapnya.

"Bisa dilihat di buku KIA, umur 0-6 bulan harus bisa berbicara apa, gerakannya harus apa, kapan anak bisa tengkurap, kapan anak bisa berdiri, kapan anak bisa berjalan, kapan bisa berhitung 1 sampai 5, kapan bisa hapal warna, semuanya ada di buku tersebut," paparnya.

Fungsi buku KIA tidak berakhir setelah persalinan saja, setelah bayi lahir, tumbuh kembang anak juga bisa dicatat di dalam buku KIA saat melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan prakelahiran, imunisasi, atau penimbangan berat badan setiap bulannya di dokter atau pun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Silahkan untuk para ibu semuanya, dapatkan buku KIA. Kalau pun tidak dapat, dan masih dengan buku versi yang lama, maka silahkan untuk mencari di internet. Ketik Buku KIA 2023, dan klik yang paling atas," tutupnya. (dwi/adv)



**JELANG PEMILU, ANGGOTA DPRD
HARUS TETAP JALANKAN TUGAS DAN
FUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA**



**BERDAMPAK BAIK KE SEKTOR
PARIWISATA, PERTAHANKAN
JADWAL TERBANG BATIK AIR**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

JELANG PEMILU, ANGGOTA DPRD HARUS TETAP JALANKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA

TANJUNG REDEB - Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong anggota dewan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Dia menyebut, ada 30 anggota DPRD Berau yang masing-masing memiliki agenda dan kesibukan. Akan tetapi, dinilainya kondisi tersebut bukan menjadi suatu alasan untuk tidak bertanggungjawab sebagai wakil rakyat.

"Tugas dan fungsi DPRD tersebut di antaranya, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran atau budgeting," ungkapnya.

Menurut Madri, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak akan mengganggu kerja seluruh anggota DPRD Berau. Tetapi banyak penyesuaian di berbagai kegiatan atau pembahasan.

"Tetapi memang akan menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Jadi bukan masalah," tuturnya.

Madri menyebutkan, tupoksi anggota DPRD sudah jelas. jadi, terkait dengan tahun politik, tentu tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. jika ada keluhan, dan meminta hearing, tentu akan dilakukan. Begitu juga untuk pembahasan anggaran 2024. Hal ini tidak menjadi penghalang, meskipun musim pemilu.

Diakuinya, anggota DPRD dipilih oleh masyarakat, tentu keinginan masyarakat yang harus diutamakan. Bukan kepentingan pribadi. Terkait dengan masa politik, menurut Madri, bisa dikerjakan, disela-sela kesibukan melayani masyarakat.

"Kenapa tidak bisa, bisa kok. Sama halnya dengan kegiatan reses juga masuk dalam pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

DIREKOMENDASIKAN KPK, DORONG PENYELESAIAN DERMAGA TELUK SULAIMAN

TANJUNG REDEB - Anggaran sekitar Rp 25 miliar dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman, Kecamatan Bidukbiduk. Diketahui, pengerjaan yang dilanjutkan berupa akses pendekat dari darat ke pelabuhan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris mengaku akan terus mengawal pembangunan dermaga tersebut hingga tuntas.

"Untuk jetty, itu sudah terbangun. Jadi tinggal membangun trestel dan tempat bersandar kapal," ungkapnya.

Dirinya membeberkan, kelanjutan pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman merupakan rekomendasi KPK. Sebab, ditengah APBD Berau yang tergolong besar, jangan sampai ada pembangunan yang mangkrak.

"Kita akan selesaikan dermaga itu. Karena menjadi rekomendasi KPK untuk diselesaikan. Jangan sampai mangkrak lagi lah," ucapnya.

Sejak awal dibangun, Dermaga

Teluk Sulaiman memang menggunakan Bankeu Provinsi Kaltim. Tahun ini Pemkab Berau juga diungkapkan Waris masih berusaha mengusulkan anggaran dari provinsi. Sayangnya belum dapat kucuran dana untuk menyelesaikan dermaga itu.

Makanya, kata dia, lanjutan pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman rencananya bakal dianggarkan pada APBD Murni 2024 mendatang. Apalagi APBD diprediksi akan naik.

"Penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman, insyaallah akan dianggarkan pada APBD tahun depan. Karena sudah ada rekomendasi dari KPK juga untuk segera diselesaikan," ungkapnya.

Dirinya juga mewanti-wanti agar jangan sampai membuat rencana infrastruktur baru terus tapi bangunan yang lama tidak selesai. Bahkan sampai bertahun-tahun tidak dirampungkan.

"Itu yang menjadi atensi kenapa tidak diselesaikan dulu bangunan lama, kemudian membuat lagi yang baru," tandasnya. (adv/dez)



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

BERDAMPAK BAIK KE SEKTOR PARIWISATA, PERTAHANKAN JADWAL TERBANG BATIK AIR

TANJUNG REDEB – Kembalinya jadwal penerbangan maskapai Batik Air dengan rute Berau-Jakarta dan Berau-Surabaya menjadi setiap hari mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

Dia mengungkapkan, kembalinya pelayanan Batik Air menjadi setiap hari sangat mempermudah masyarakat yang hendak bepergian ke luar daerah.

“Saya harap ini bisa terus bertahan setiap hari, karena mempermudah kita yang akan bepergian ke Jakarta dan Surabaya tanpa harus transit Balikpapan,” ungkapnya.

Andi Amir menilai, penerbangan langsung dari Surabaya dan Jakarta ke Berau juga sangat mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung ke Bumi Batiwakkal.

“Tentunya hal ini juga semakin menarik minat wisatawan datang ke daerah kita. Selain harga yang cukup hemat, juga mengifisienkan waktu,” tuturnya.

Dia mengaku sangat mengapresiasi upaya pihak terkait untuk mengembalikan jadwal operasional Batik Air ke Berau.

“Saya harap jangan berubah lagi jadwal penerbangannya, upayakan terus terbang setiap hari,” tegasnya.

Dirinya menyebut, harga rute penerbangan Berau-Balikpapan menggunakan Batik Air juga mengalami penurunan harga, sehingga sedikit meringankan beban masyarakat.

“Ini merupakan keuntungan adanya pesawat berbadan besar yang beroperasi di Bandara Kalimara, karena dapat menciptakan persaingan harga tiket,” terangnya.

Politikus Golkar ini berharap maskapai Batik Air terus melayani masyarakat kabupaten paling utara Kaltim ini.

“Karena masuknya Batik Air ini dapat membuat harga tiket pesawat stabil,” pungkasnya. **(adv/dez)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena saat menggelar reses.

BANYAK ASPIRASI YANG SERIUS DALAM RESES DARLENA

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses di Biatan. Ditemui beberapa persoalan serius yang harus segera ditangani.

Dia mengungkapkan, banyak aspirasi serius yang disampaikan, namun belum ada tindakan dari pemerintah untuk mengatasinya.

Ia menyebut, usulan yang berhasil tertampung diantaranya permasalahan tapal batas Kabupaten Berau dan Kutai Timur, bangunan Sekolah Dasar (SD) yang tidak layak serta masalah tenaga kesehatan.

"Petama, masalah tapal batas, ini sudah berjalan sejak lama dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, sejak beberapa tahun belakang bukan karena batas saja, melainkan tindak diskriminasi oleh Ormas yang datang," terangnya.

"Parahnya lagi, mereka dengan mudah mengambil dengan sistem rampas hasil kebun salah satu masyarakat yang berada di dua kampung Kecamatan Biatan," lanjutnya.

Ia memaparkan, dari keterangan warga kejadian tersebut, berlangsung sejak delapan tahun lamanya, hingga saat ini belum terselesaikan.

"Nanti saya akan mempertanyakan secara langsung kepada pihak eksekutif bagaimana penyelesaiannya. Ini

masalah serius harus secepat mungkin di selesaikan oleh pemerintah daerah. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, terkait persoalan pendidikan, masih terdapat bangunan sekolah yang tidak layak dan perlu perhatian lebih. Darlena pun menyayangkan dari besaran anggaran yang diperuntukan, khusus penunjang pendidikan, tapi belum direalisasikan secara penuh.

"APBD kita besar, apalagi untuk pendidikan itu 20 persennya, lantas kenapa masih ada sekolah belum mendapat fasilitas yang baik," ucapnya.

Kemudian, usulan terkait tenaga kesehatan, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan di kedua kampung. Untuk itu, masyarakat meminta diberikan fasilitas guna mempermudah penanganan medis kedepannya.

Darlena menegaskan, seluruh usulan masyarakat akan diupaya sesegera mungkin. Mengingat, permintaan masyarakat dirasa cukup krusial.

"Akan saya pertanyakan nantinya aksi dari pemerintah setelah rapat pembahasan hasil usulan reses di masa sidang ketiga ini, bila perlu akan saya ajak langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat disini," tandasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto saat menggelar reses.

NORMALISASI DRAINASE JADI PERHATIAN DEDY OKTO

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mendorong normalisasi drainase di wilayah perkotaan Bumi Batiwakkal.

Dia mengungkapkan, ada beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) I Tanjung Redeb. Hanya saja, salah satu usulan yakni normalisasi drainase dirasa cukup penting.

“Saluran irigasi drainase di daerah ini bisa dikatakan kurang baik. Apalagi, setiap turun hujan dengan curah tinggi, pastinya akan banjir,” ungkapnya.

Dirinya mengaku akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terlebih dahulu. Lalu, mengevaluasi terkait mekanisme pangang-

garan untuk perbaikan drainase tersebut.

“Tentunya dengan bentuk drainase yang agak besar dari sebelumnya. Agar saluran air nya sendiri bisa lebih lancar, jadi meskipun curah hujan tinggi sekalipun air tidak akan mengendap dan banjir juga tidak akan terjadi disini lagi,” jelasnya.

Namun, penanganan terkait normalisasi drainase saluran air tersebut harus tetap melalui proses yang ada. Mulai dari penganggaran, Peninjauan yang di lakukan dinas terkait hingga pembangunannya nanti.

“Saya akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tahap perrealisasiannya bisa segera terlaksana dan permasalahan banjir di daerah ini bisa teratasi,” tutupnya. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

DUKUNG TARGET PEMERINTAH PUSAT TURUNKAN ANGKA STUNTING

TANJUNG REDEB - Adanya target pemerintah pusat untuk menurunkan persentase angka stunting didukung jajaran legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengungkapkan, stunting harus menjadi perhatian lebih untuk pemerintah, karena berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak.

"Maka dari itu, penyuluhan dari posyandu harus digencarkan. Apalagi yang ada di kampung-kampung, tentu jadi prospek besar untuk menyuguhkan pola hidup sehat ibu dan anak," ungkapnya.

Menurutnya, jika penyuluhan dilakukan maksimal, maka pemenuhan gizi bagi bayi dapat terpenuhi. Hal itu juga

menjadi tanggungjawab orang tua.

"Paling tidak, para orang tua yang memiliki anak bayi bisa mendapat pengalaman, pemahaman dan bimbingan dari para kader posyandu setempat," ujarnya.

Politikus Demokrat ini menegaskan, perkembangan seorang anak jangan sampai tidak diperhatikan. Sehingga persiapan menu makanan harus dipenuhi. Terlebih sudah ada lokasi khusus rawan stunting, yang dinilai perlu adanya intensitas pendampingan serta pembinaan harus ditingkatkan.

"Apabila hal-hal seperti itu diperhatikan dengan baik, kami yakin satu atau dua tahun ke depan angka stunting di Kabupaten Berau bisa menurun," pungkasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

KEGIATAN FISIK HARUS PERHATIKAN ASPEK KUALITAS

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menganggap banyak kegiatan pembangunan yang hanya berorientasi pada target penyelesaian, bukan hasil.

Dia membeberkan, banyak kegiatan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada selesainya pekerjaan tersebut, namun tidak pada hasil.

“Seperti pariwisata, sampai saat ini pariwisata banyak dijadikan alasan suatu pekerjaan yaitu untuk mendukung sektor pariwisata. Tetapi data menunjukkan bahwa sektor ini jalan ditempat karena sangat kecil dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Berau secara umum yang dapat dilihat dari PDRB,” jelasnya.

Kemudian jalan usaha tani, ban-

yak jalan dibuat dengan nama Jalan Usaha Tani tetapi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat tidak meningkat. Ada juga irigasi, dimana banyak jaringan irigasi dibuat tetapi hasilnya tidak ada.

“Konstruksi dalam pelaksanaan (KDP) yang mangkrak seperti jalan Bandara Mantaritip Segmenandara – S. Kelay dan S. Kelay – Mantaritip akibat tidak adanya jembatan. Inti dari semua itu adalah salahnya penempatan modal atau aset pemerintah, akibat tidak adanya perencanaan secara komperensif dan holistik,” tambahnya.

Hal ini akan semakin tidak jelas jika bukan hanya bicara sampai outcome yang merupakan dampak jangka pendek tetapi pada impact yang merupakan dampak jangka panjang. (adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

MUDAHKAN KELOMPOK TANI, SARANKAN PANGKALAN PUPUK

TANJUNG REDEB - Agar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mudah dalam memenuhi kebutuhan pupuk, Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyarankan setiap kecamatan memiliki pangkalan pupuk.

Dia menerangkan, pupuk sangat penting untuk petani. Sebab berpengaruh terhadap pemberian nutrisi ke berbagai unsur.

"Pupuk ini memang sangat diperlukan baik itu pupuk subsidi atau non subsidi," ungkapnya.

Nurung membeberkan bahwa dirinya sudah menyampaikan keluhan petani mengenai pupuk ke Dirjen Pu-

puk dan Pestsida.

"Padahal dulu tidak seperti itu. Petani mudah saja untuk mendapatkan pupuk," jelasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menyarankan kepada setiap kampung dan kecamatan memiliki pangkalan pupuk masing-masing. Agar Gapoktan langsung mengusulkan ke pangkalan pupuk di daerahnya, tanpa jauh-jauh mencari pangkalan pupuk.

"Saya sarankan setiap kampung, minimal di kecamatan punya pangkalan pupuk masing-masing," tandasnya. **(adv/dez)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

TPI TANJUNG BATU DINILAI BISA MENJADI SUMBER PAD

TANJUNG REDEB – Kampung Tanjung Batu akan memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka dari itu Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendorong Dinas Perikanan (Diskan) untuk mengontrol produksi ikan di sana.

Dia mengungkapkan, pembangunan TPI tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan.

“Sehingga dengan adanya TPI tersebut, pendaratan ikan sudah terfokus di satu tempat saja,” ungkapnya.

Dibeberkannya, produktivitas ikan di Tanjung Batu tidak terkontrol dengan baik. Pasalnya, para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya ke pengepul.

“Tentu jika terus dibiarkan, dari

segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menguntungkan,” tuturnya.

Saga menerangkan, selama ini para pengepul memiliki pos-pos tersendiri. Hal itu, menurutnya membuat Diskan Berau sulit dalam mengontrol produksi ikan.

“Karena para nelayan tidak lapor hasil produksinya, melainkan langsung menjualnya ke pengepul,” jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Diskan Berau harus membuat inovasi untuk mengontrol hasil produksi nelayan di perairan Pulau Derawan dan sekitarnya.

“Karena TPI ini berkontribusi meningkatkan PAD, selain itu juga nelayan terbantu karena hasil tangkap mereka langsung dipasarkan secara luas,” pungkasnya.

(adv/dez)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

JANGAN SAMARATAKAN PEMBANGUNAN PENGAMANAN PANTAI

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah menyoroti abrasi yang mengancam beberapa daerah di pesisir selatan Bumi Batiwakkal.

Ia mengharapkan pemerintah tidak menyamaratakan seluruh pembangunan pengamanan pantai. Palsanya, diperlukan kajian serius agar penanganan tidak dilaksanakan sia-sia.

Dirinya menerangkan, pembangunan pengaman pantai tersebut merupakan kewenangan pusat dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan. Namun hal itu bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam.

"Penanganan abrasi itu jangan disamaratakan. Khususnya yang ada ge-

lombangnya tinggi harus dibangun pengaman pantai yang berbeda dengan yang gelombang lautnya kecil," jelasnya.

Yang mana tujuannya agar pengaman pantai yang akan dipasang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apalagi, sudah ada preseden buruk terkait hal itu, seperti pembangunan bronjong yang ada di Pulau Derawan.

"Perlu kajian matang ya supaya jangan baru dibangun terus rusak, dibangun rusak lagi. Ujung-ujungnya tidak ada manfaatnya," tegasnya.

"Ke depan masalah abrasi ini harus diperhatikan. Harus ada upaya-upaya. Terus harus dengan BWS. Sehingga bisa turun anggaran untuk pembangunannya," tandasnya. (adv/dez)



SOPIR TRUK CONCRETE PUMP DITETAPKAN TERSANGKA



**PELAKU MENGAKU TERLILIT UTANG,
TINDAK CURAS DI ALFAMIDI BATUAH**



Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ripyani saat melihat sopir truk SY diperiksa penyidik.

SOPIR TRUK CONCRETE PUMP DITETAPKAN TERSANGKA

BALIKPAPAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Balikpapan resmi menetapkan sopir truk concrete pump atau penembak semen, berinisial SY (48) sebagai tersangka dalam kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, KM 1,5 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara pada Kamis (26/10/2023) kemarin.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ripyani mengatakan, penetapan sopir truk sebagai tersangka setelah melewati proses BAP, dan polisi juga telah memeriksa surat izin mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

"Status sopir sudah kita amankan sebagai tersangka, karena memang mengakui bahwa dia gagal melakukan pengereman. SIM B2 milik sopir masih berlaku, artinya memang gagal pengereman," ujarnya, Jumat (27/10/2023).

Lebih lanjut Ripyani menjelaskan, bahwa

pihaknya masih akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan juga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Di mana pihaknya akan memeriksa kernet dan pemilik kendaraan roda 6 tersebut selaku penanggungjawab operasional kendaraan yang dikemudikan SY.

Pemeriksaan itu dilakukan kepolisian guna memastikan kondisi kendaraan dalam perawatan berkala termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan.

"Kernet dan pemilik kendaraan yang akan di BAP hari ini dengan membawa surat-surat kelengkapan kendaraannya baik STNK, BPKB maupun KIR kendaraan," jelasnya.

Selain sang sopir, polisi juga telah mengamankan kendaraan truk concrete pump atau penembak semen dengan nopol KT 8370 LQ di Makopolresta Balikpapan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kedua pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan R dan A di Alfamidi Batuah saat di giring petugas.

PELAKU MENGAKU TERLILIT UTANG, TINDAK CURAS DI ALFAMIDI BATUAH

BALIKPAPAN - Dua pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) berinisial R (22) dan A (23) telah ditangkap jajaran tim opsional gabungan dari Polda Kaltim, Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Utara beberapa waktu lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di Makopolsek Balikpapan Utara, keduanya mengaku nekat melancarkan aksinya tersebut lantaran sedang terlilit utang dengan sebuah leasing di Kota Balikpapan.

Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Bitab Riyani mengatakan, pasca kejadian aksi curas di mini market Alfamidi Batuah Rabu, 18 Oktober 2023 lalu kedua tersangka sempat dipergoki warga. Namun karena masing-masing tersangka membawa senjata tajam jenis celurit dan pisau, warga pun membiarkan keduanya melarikan diri.

"Tim opsional gabungan yang mendapat laporan langsung bergerak mengejar tersangka. Keduanya ditangkap tak lebih dari 12 jam, kemarin itu," ujarnya, Jumat (27/10/2023).

Lebih lanjut Bitab Riyani menjelaskan, untuk tersangka R ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Mandastana, sedangkan tersangka A ditangkap di kawasan Kampung Timur. Dari masing-masing tersangka turut ditemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatannya.

"Ada uang senilai Rp1 juta lebih dan berbagai jenis rokok elektrik. Kita amankan juga pakaian tersangka saat melakukan aksi curas tersebut," jelasnya.

Sementara itu berdasarkan pengakuan tersangka R, yang juga merupakan otak kejahatan curas ini mengaku, jika sebelum beraksi keduanya lebih dulu mencari mini market yang sepi. Keduanya mengaku telah mengamati mini market Alfamidi Batuah beberapa hari.

"Keliling dulu, cari yang sepi. Di sana kita liat selalu sepi jadi sasarannya yang di sana," ujar R di hadapan media.

R juga mengaku, jika senjata tajam yang dibawanya tersebut miliknya yang memang sudah disiapkan jika ada perlawanan dari korban. Sayangnya ia mengaku tak memprediksi jika aksinya tersebut sempat diketahui warga.

"Memang kita bawa itu (sajam) dari rumah. Buat jaga-jaga. Nggak tau juga, tahu-tahu warga ramai, jadi kita ayun-ayunkan saja pisaunya," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan juga diketahui jika mini market Alfamidi Batuah mengalami kerugian hingga Rp 9 juta lebih.

"Pengakuan pelapor itu uang yang hilang ada Rp 9 juta beserta beberapa barang di etalase jualannya," sambung Kapolsek Balikpapan Utara.

Kini akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal disangkakan dengan Pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan, di mana ancamannya kurungan penjara minimal 5 tahun.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SABTU
28 OKT 2023



AKOMODIR NASIB GURU HONORER, DPRD PASER BAKAL TEMPUH JALUR KHUSUS

**KOMNASDIK MINTA PEMERINTAH
PERTIMBANKAN USIA DAN MASA
KERJA GURU PPPK**





Ketua Komisi II DPRD Paser, Ikhwan Antasari.

AKOMODIR NASIB GURU HONORER, DPRD PASER BAKAL TEMPUH JALUR KHUSUS

PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser bakal menggunakan jalur khusus untuk memperjuangkan nasib guru honorer soal penambahan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu merupakan keinginan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar Non Kategori Usia 35 Plus (GTKH NK 35+) Paser yang disampaikan belum lama ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Paser pada 23 Oktober lalu.

Selain penambahan kuota PPPK, mereka juga memperjuangkan nasibnya agar dalam penerimaan PPPK nantinya bisa dikategorikan sebagai prioritas. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari mengatakan sejauh ini pihaknya terus memperjuangkan nasib para guru honorer.

"Akan terus kami perjuangkan kesejahteraannya, kalau bisa ditambah terus kuotanya untuk penerimaan PPPK. Itu yang kami inginkan juga," kata Ikhwan antasari belum lama ini di Tanah Grogot.

Menurutnya, DPRD Paser tak punya we-

wenang untuk mengakomodir keinginan itu ke pemerintah daerah (Pemda), sehingga para pegawai honorer usia 35 ke atas tak bisa langsung diangkat menjadi PPPK.

"Semua itu ada aturan-aturan yang mesti kita tempuh dan jalani," tambahnya.

Dengan demikian, pihaknya berencana akan menggunakan jalur-jalur politik yang dimiliki, dengan berkunjung ke Kementerian dan Komisi yang membidangi pendidikan di DPR RI.

"Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dari forum GTKH NK 35+ untuk diperjuangkan kembali, utamanya meminta penambahan kuota formasi PPPK di dunia pendidikan ini," tegasnya.

Ikhwan berharap, dengan adanya perubahan Undang-Undang ASN bisa membawa angin segar bagi semua pihak.

"Sebagai jalan kita memperjuangkan GTKH NK 35+ supaya tidak perlu lagi menggunakan tes, tapi bisa ada pertimbangan-pertimbangan dan menjadi prioritas untuk bisa diangkat menjadi PPPK," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Ketua I Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Kaltim, Kasrani.

KOMNASDIK MINTA PEMERINTAH PERTIMBANKAN USIA DAN MASA KERJA GURU PPPK

PASER - Ketua I Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Kaltim, Kasrani menurkan pemerintah akan tetap menghapus pegawai honorer pada November mendatang. Sebagai gantinya akan meluncurkan status baru.

"Status tersebut adalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau istilahnya PNS part time," katanya, Kamis (26/10/2023).

Ia mengatakan, penghapusan itu ditungkan dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam revisi undang-undang ini pemerintah membuka status baru ASN.

"Semula hanya terdiri dari dua unsur yakni PNS dan PPPK, menjadi tiga unsur. Yaitu PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu," sebutnya.

Dalam penerimaan PPPK tahun ini, Kasrani mendesak pemerintah untuk guru kontrak atau honorer menjadi prioritas dalam pengangkatan. Dengan catatan harus

mempertimbangkan usai dan masa kerja.

"Sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan. Harus ada penambahan persyaratan dalam sistem penerimaan PPPK yang menyangkut usia dan masa kerja sebagai bahan pertimbangan utama," terangnya.

Dalam penilaian Kasrani perjuangan guru selama ini sudah sangat luar biasa dalam mewujudkan generasi yang cerdas dan berpendidikan. Sudah sepatutnya pantas diberikan penghargaan untuk prioritas sebagai tenaga PPPK.

"Tentunya dengan masuk sebagai PPPK akan meningkatkan profesionalismenya sebagai guru," jelasnya.

Ia berpesan guru honorer harus mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi atau tes sebagaimana para CASN yang berkompetisi untuk masuk ke pemerintahan.

"Insya Allah semuanya akan menjadi P3K secara bertahap," pungkas Kasrani.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari